

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Riwayat Hidup Benazir Bhutto

Benazir Bhutto Lahir dari pasangan Ali Bhutto dan istri keduanya Begum Nusrat pada 21 Juni 1953 di Karich. Ia dibesarkan dalam masyarakat yang mayoritas masih buta huruf dan feodal, di mana perempuan masih dianggap lebih seperti anggota keluarga, di mana laki-laki pergi mencari nafkah dan perempuan hanya melakukan pekerjaan rumah tangga. Di mana ini merupakan pola pikir yang sangat jauh dari kata modern, karena itulah Benazir melakukan sebuah revolusi pikiran yakni dengan cara memberikan contoh bahwa perempuan juga keluar rumah dengan tujuan bekerja maupun sekolah. Yang mana sekolah adalah hal terpenting bagi rakyat supaya bisa memajukan kembali negara, rakyat adalah aset negara terpenting karena negara tanpa adanya rakyat tidak bisa menjadi negara<sup>1</sup>.

Maka dari itu Ali Bhutto ayah dari Benazir pun menyekolahkan putrinya tersebut mulai dari sekolah dasar sampai universitas, walaupun beliau adalah keluarga yang menganut agama Islam Benazir tetap sekolah di sekolah katolik bahkan ayahnya menyuruh untuk mentamatkan sekolahnya tersebut sampai lulus<sup>2</sup>.

Benazir belajar di Lady Jennings Nursery School dan sekolah perempuan Jesus and Mary di Karachi, Pakistan. Setelah dari sana beliau melanjutkan sekolahnya di Rawalpindi Presentation Convent. Begitu setelah tamat sekolah menengahnya di umur yang ke 15 tahun Benazir dikirim ke Amerika untuk melanjutkan studinya di Radcliffe College, sebuah sekolah wanita Katolik di bawah bendera Universitas Harvard. Di Amerika, terlihat dalam waktu relatif singkat bahwa Benazir bisa menghadapi budaya Barat yang sangat berbeda dengan budaya Pakistan. Oleh karna itu Benazir sangat aktif di kampusnya, sampai akhirnya beliau ikut berpartisipasi dalam demonstrasi anti perang Vietnam<sup>3</sup>.

Setelah lulus dari Universitas Harvard pada tahun 1973, ia melanjutkan studinya di Universitas Oxford di Inggris, di mana ia lulus pada tahun 1977. Benazir dikenal di kampus sebagai orator

---

<sup>1</sup> Zaenal Ali, *Tragedi Benazir Bhutto* (Yogyakarta: Narasi, 2008), h. 36.

<sup>2</sup> Dhuroruddin Mashad, *Benazir Bhutto: Profil Politisi Wanita di Dunia Islam* (Jakarta: Pustaka CIDESINDO, 1996), h. 9.

<sup>3</sup> Dhuroruddin Mashad, *Benazir Bhutto: Profil Politisi Wanita di Dunia Islam* (Jakarta: Pustaka CIDESINDO, (1996), h. 15

berbakat, bahkan pada tahun 1976 Benazir terpilih sebagai Presiden Oxford Union, sebuah kelompok diskusi di kampus Oxford, menjadi wanita Asia pertama yang memimpin kelompok elit yang langsung menarik perhatian media dunia<sup>4</sup>.

Benazir tinggal di luar negeri terlalu lama menjadikannya tidak begitu nyaman dengan budaya Pakistan, namun terkadang Benazir mencampurkan budaya yang ada di Pakistan dengan budaya Barat. Akulturasi demikian akhirnya membentuk Benazir pada suatu pribadi yang “mendua” dalam arti tak mempunyai ketertarikan kuat terhadap suatu nilai tertentu, baik terhadap Islam, adat-istiadat Pakistan, maupun nilai-nilai sekuler Barat. Dalam kehidupannya Benazir pun cenderung berusaha menggabungkan berbagai nilai yang telah tersosialisasi, terinternalisasi dan terakulturisasi dalam dirinya<sup>5</sup>.

Sebenarnya Benazir sudah mengenal politik dalam usia kanak-kanak, dikarenakan ayahnya sendiri yaitu Ali Bhutto yang sudah menjabat pos-pos penting di pemerintahan Pakistan mulai dari Menteri Luar Negeri, Ketua Delegasi Pakistan di PBB, dan akhirnya sebagai Perdana Menteri pada masa itu, itu lah yang menjadikannya aktif dalam kegiatan-kegiatan kampus seperti aktif dalam beberapa diskusi bersama teman-teman antar negaranya. Itulah tujuan ayahnya agar Benazir bisa melanjutkan kiprah ayahnya sebagai politisi<sup>6</sup>.

Sepulangnya Benazir dari luar negeri karena mengejar pendidikannya, sebenarnya dia masih belum siap untuk terjun langsung dalam politik mendampingi ayahnya. Namun dalam beberapa kesempatan Benazir menemani ayahnya dalam bertugas, Misalnya, pada usia 18 tahun, Benazir menemani ayahnya dalam perjalanan bersejarah ke Simla, India, di mana Bhutto dan Gandhi menandatangani Kesepakatan Simla untuk mengakhiri krisis Bangladesh. Pada usia 25 tahun, Benazir diangkat menjadi anggota Komite Sentral Partai Rakyat Pakistan<sup>7</sup>.

Menyusul eksekusi ayahnya oleh rezim militer Zia ul-Haq pada 1979, Benazir secara tidak resmi menjadi pemimpin sementara Partai Rakyat Pakistan. Namun, dia ditempatkan di bawah tahanan rumah dari 1979-1984. Dari tahun 1984 hingga 1986 ia bahkan dikeluarkan, sejak saat itu Benazir berpikir dengan keras bagaimana caranya agar dia dan keluarga tidak diasingkan dan dipandang

---

<sup>4</sup> Dhuroruddin Mashad, *Benazir Bhutto: Profil Politisi Wanita di Dunia Islam*, (Jakarta: Pustaka CIDESINDO, (1996), h. 13

<sup>5</sup> Dhuroruddin Mashad, *Benazir Bhutto: Profil Politisi Wanita di Dunia Islam*, (Jakarta: Pustaka CIDESINDO, (1996), h. 19

<sup>6</sup> Zaenal Ali, *Tragedi Benazir Bhutto*, (Yogyakarta: Narasi, 2008), h. 53.

<sup>7</sup> Dhuroruddin, *Benazir Bhutto: Profil Politisi Wanita di Dunia Islam*, h. 72

sebelah mata lagi oleh masyarakat Pakistan. Akhirnya dengan berbagai cara kemudian Benazir bisa kembali ke Pakistan dan segera menjadi tokoh penting yang memposisikan diri sebagai oposisi Presiden Zia ul-Haq<sup>8</sup>.

Pada 17 Agustus 1988, Pakistan diguncang oleh kecelakaan pesawat yang menewaskan Jenderal Mohammad Zia ul Haq dan 20 personel militer senior Pakistan, termasuk Panglima Angkatan Darat Jenderal Akhtar Abdul Rahman dan Duta Besar Amerika untuk Pakistan Arnold Raphel dan penasihat militer Amerika untuk Brigjen Pakistan Gen. Herbert Wassom dan 10 warga sipil. Pesawat Hercules itu meledak di udara hanya beberapa menit setelah lepas landas dari Bandara Sipil Bahawalpur, 550 km selatan Islamabad, pada pukul 11.30 waktu setempat<sup>9</sup>.

Berita meninggalnya Zia ul Haq tentunya membuat Benazir Bhutto senang, yang sudah lama berambisi menyingkirkan Zia ul Haq dari kekuasaan. Benazir Bhutto menyimpan dendam pribadi terhadap Zia ul Haq karena ayahnya, Zulfikar Ali Bhutto, digantung di Penjara Pusat Rawalpindi pada 4 April 1979<sup>10</sup>. Proses naiknya Benazir ke tampuk kekuasaan berjalan lancar setelah Angkatan Darat Pakistan, sebagai badan pembuat keputusan politik Pakistan, mengizinkan pemilihan yang jujur dan adil. Meskipun tentara Pakistan tidak benar-benar ingin warga sipil memerintah negara itu, setelah kematian Presiden Zia ul-Haq dalam kecelakaan pesawat, militer tidak mau mengambil alih kekuasaan<sup>11</sup>.

Situasi politik Pakistan tidak pernah jauh dari pemberitaan media internasional, dan kekacauan politik tampaknya menjadi citra buruk di mata masyarakat internasional. Sejak negara itu mendeklarasikan kemerdekaannya dari India, telah terjadi kekacauan, dari masalah pengungsi hingga intervensi militer dalam politik setelah perang. Sistem politik yang tidak stabil disebut-sebut sebagai alasan utama berlanjutnya pergantian kekuasaan di Pakistan. Pergantian kekuasaan di Pakistan tidak selalu dilakukan secara

---

<sup>8</sup> Dhururudin Mashad, *“Pemilu di Pakistan 1990: Kegagalan Benazir Bhutto Dalam Meraih Kekuasaan”*, *Jurnal Ilmu Politik* 13 (Jakarta: PT Gramedia, 1993), h. 75.

<sup>9</sup> “Misteri kematian Zia ul-Haq,” data diakses pada 09 November, dari <http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/1989/08/05/SEL/mbm.19890805.SEL21028.id.html>

<sup>10</sup> “Misteri kematian Zia ul-Haq,” data diakses pada 09 November, dari <http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/1989/08/05/SEL/mbm.19890805.SEL21028.id.html>

<sup>11</sup> Dhururuddin Mashad, *Benazir Bhutto: Profil Politisi Wanita di Dunia Islam* (Jakarta: Pustaka CIDESINDO, 1996), h. 10.

demokratis seperti melalui pemilihan umum, tetapi melalui kudeta (*coup d'état*) oleh militer. Pemerintahan militer telah ada di bawah Jenderal Ayub Khan sejak 1956, sebelum Jenderal Yahya Khan melakukan kudeta militer kedua. Kekuatan militer berakhir setelah rakyat Pakistan menginginkan pemerintahan baru, era baru yang dipimpin oleh politisi sipil, dengan bangkitnya Zulfikar Ali Bhutto, menggantikan Jenderal Yahya Khan sebagai presiden<sup>12</sup>.

“Pemerintahan militer maupun sipil yang silih berganti memimpin Pakistan tidak merubah salah satu dasar konstitusinya yaitu semua undang-undang harus mengikuti prinsip-prinsip dasar Islam”. Menyadari bahwa Pakistan adalah negara Islam, menggunakan sistem demokrasi yang mendukung peran ulama, para politisi ini mencari dukungan besar-besaran untuk kekuasaan mereka. Para ulama bersikeras bahwa Pakistan tetap menjadi negara berdasarkan prinsip-prinsip dasar Islam, sehingga akan sulit bagi mereka untuk memerintah ketika politisi yang berkuasa tidak hidup sesuai dengan prinsip-prinsip yang mereka junjung tinggi. Pemerintahan sipil Bhutto hanya berlangsung lima setengah tahun sebelum tentara Pakistan mengambil alih kembali. Pada tanggal 5 Juli 1977, Bhutto digulingkan oleh militer, dan militer mengambil alih kekuasaan lagi bukan karena ambisi politik, tetapi karena Bhutto menangani ketegangan yang disebabkan oleh para pemimpin politik lainnya, partai mereka dan rencana mereka<sup>13</sup>.

Kudeta tersebut mendapat dukungan dari partai-partai Islam yang menentang kebijakan sosialis Bhutto dan berangkat dari nilai-nilai Islam sebagai negara Pakistan, sehingga mereka membentuk koalisi nasional yang didukung oleh militer, terutama Zia ul-Haq yang berjanji akan menjaga kepentingan mereka. Di tengah kekacauan di Pakistan, pengambilalihan kekuasaan oleh militer mendapat reaksi beragam. Pendukung Bhutto tidak ingin militer kembali berkuasa di Pakistan, yang dilakukan selama pemerintahan militer di bawah Jenderal Zia ul-Haq. Gerakan-gerakan ini menciptakan kekuatan oposisi baru terhadap pemerintah, yang dilakukan tidak hanya oleh politisi laki-laki tetapi juga oleh politisi perempuan dengan susah payah, karena sebagai "wanita pertama yang memimpin negara mayoritas Muslim di era pascakolonial adalah Benazir Bhutto"<sup>14</sup>.

---

<sup>12</sup> Zaenal Ali, *Tragedi Benazir Bhutto* (Yogyakarta: Narasi, 2008), h. 45.

<sup>13</sup> Veena Kukreja, “*Military Politics in Pakistan: Ten Years of Zia’s Rule, Strategic Analysis*”, (Agustus 1988), h. 428.

<sup>14</sup> Veena Kukreja, “*Military Politics in Pakistan: Ten Years of Zia’s Rule, Strategic Analysis*”, (Agustus 1988), h. 429.

Pada masa itu golongan Islami dibagi menjadi dua, yaitu pertama Islam populer sebuah kombinasi antara tradisi dengan agama, sedangkan yang kedua Islam sentralis tetap menerima budaya asalkan tidak mengganggu ajaran Islam. Benazir Bhutto adalah orang yang masuk dalam golongan yang modernis sekuler yang mana beliau adalah orang yang berpendidikan dan memiliki pemikiran barat, tapi sayangnya dalam hal agama Benazir belum cukup banyak ilmunya. Dalam hal ini Benazir beranggapan bahwa negara tidak perlu didasarkan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah sebab dalam menciptakan cita-cita negara yang sekulerisme itu dengan persamaan hak dan keadilan, dengan demikian maka nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah akan muncul dengan sendirinya tanpa adanya paksaan hak<sup>15</sup>.

Pada Kenyataannya, Zia tanpa henti menunda pemilihan, melarang partai politik dan menyensor media dengan keras, membenarkan kekuasaannya sebagai penegak darurat militer dan presiden atas nama Islam. Dikecualikannya partai politik dari partisipasi pemerintah jelas memberi Zia ul-Haq kekuatan besar, dan mengakui partai politik dalam sistem Islam berarti memberikan legitimasi kepada pemerintahannya<sup>16</sup>.

Zia juga menyatakan bahwa pemerintahannya bersifat sementara, diperkuat dengan pernyataannya bahwa angkatan bersenjata Pakistan menginginkan pemerintahan tetap berada di tangan pejabat terpilih. Nyatanya, Zia tidak memenuhi janji tersebut, malah berusaha mengkonsolidasikan kekuasaan dan memperluas ambisi politiknya untuk menguasai sepenuhnya kehidupan politik Pakistan. Ia mendominasi kehidupan politik dan berusaha menggalang dukungan dari berbagai kalangan untuk mempertahankan kekuasaannya, termasuk unsur militer, birokrasi, pemilik tanah dan unsur agama<sup>17</sup>.

Tidak hanya menganggap tentara sebagai pokok dan landasan pemerintahannya, tetapi juga menempatkan tentara dalam posisi yang sangat penting dalam konstitusi sebagai pilar tertinggi keutuhan negara. Pembatalan pemilu 18 Oktober 1977 yang dijanjikan Zia memperkuat kekuatan militer dalam kehidupan politik Pakistan. Sebagai tokoh sentral di ketentaraan, Zia kemudian

---

<sup>15</sup> John L. Esposito dan Jon O. Voll, *Demokrasi di Negara-negara Muslim: Problem dan Prospek* (Bandung: Mizan, 1999), h. 145.

<sup>16</sup> Sawhney, *Zia's Pakistan* (New Delhi: ABC Publishing House, 1985), h. 19.

<sup>17</sup> Dhururuddin Mashad, *Benazir Bhutto: Profil Politisi Wanita di Dunia Islam*, h.

memproklamasikan dirinya sebagai presiden dan Kepala Administrator Darurat Militer (CMLA). Legitimasi perwira angkatan darat menjadi faktor utama yang memungkinkan Zia memegang tampuk kekuasaan selama sebelas tahun<sup>18</sup>.

Kediktatoran Zia ul-Haq sangat terlihat ketika dia menghukum mati Zulfikar Ali Bhutto dan memenjarakan lawan politiknya, termasuk keluarga Bhutto. Benazir dideportasi dari Pakistan pada tahun 1982 setelah tiga tahun di penjara. Kecuali bahkan ibu Nusrat masuk penjara. Tekanan 11 tahun pemerintah Zia ul-Haq terhadap keluarga Bhutto terbukti bermanfaat, dengan semakin populernya dukungan pendukung untuk Benazir Bhutto sebagai tokoh oposisi yang berani menentang pemerintahan militer Zia ul-Haq. Dengan demikian Benazir Bhutto yang awalnya kurang tertarik dalam dunia politik dan sempat memberikan statement bahwa “Tapi aku bukanlah seorang aktivis politik, aku hanya tertarik pada masalah-masalah internasional tanpa melibatkan unsur politik dalam kehidupanku”, dan sekarang menjadi penerus perjuangan politik Zulfikar Ali Bhutto, atas kediktatoran yang dilakukan pemerintahan militer Zia ul-Haq<sup>19</sup>.

Setelah kematian Zia ul-Haq, Benazir langsung secara cepat mengumpulkan beberapa berkasnya untuk mengikuti pencalonan sebagai perdana menteri. Pemilihan umum ini sangat ketat dan dilakukan secara adil dan jujur, sebagaimana tadi dijelaskan diatas bahwa selama ini Pakistan dipimpin oleh rezim militer. Maka dari itu Benazir berusaha agar pemilu kali ini benar-benar dilakukan secara adil dan bersifat terbuka untuk semua rakyat Pakistan<sup>20</sup>.

Benazir Bhutto adalah perdana menteri wanita pertama Republik Islam Pakistan dan perdana menteri termuda di negara itu. Beliau bersama ibunya yang bernama Nusrat Bhutto melakukan perjuangan melawan kekuasaan militer, menyebabkan penahanannya sampai diasingkan ke luar negeri. Namun, keduanya menghadapi kesulitan dalam peran mereka, karena hal itu terlihat di luar konvensi politik Pakistan tentang laki-laki yang memprioritaskan peran perempuan sebagai pemimpin. Perjuangan membangun kembali demokrasi di negaranya juga tercermin dari langkah demokrasi menjadi ketua politik *Pakistan People's Party* (PPP) yang

---

<sup>18</sup> Anita M Weiss, “*Benazir Bhutto and The Future of Women in Pakistan*”, ASIAN SURVEY. Vol. XXX No 5, May 1990, h 443.

<sup>19</sup> Anita M Weiss, “*Benazir Bhutto and The Future of Women in Pakistan*”, ASIAN SURVEY. Vol. XXX No 5, May 1990, h 447.

<sup>20</sup> Raul B. Rais, “*PAKISTAN IN 1988: From Command to Conciliation Politics*”, ASIAN SURVEY, Vol XXIX, No. 2, February 1989, h. 205

sebelumnya dipimpin oleh ayahnya. Gerakan Benazir menggulingkan pemerintah yang dikendalikan Zia ul-Haq yang mengkuudeta ayahnya selama masa jabatannya sebagai perdana menteri adalah alasan utama, serta menghapuskan kediktatoran dan memulihkan demokrasi di Pakistan<sup>21</sup>.

Upaya beliau menjadi pemimpin partai politik sangat tidak mudah, banyak yang pro dan kontra mengenai pemimpin partai perempuan yang selalu memandang gender. Apalagi Benazir berada di dalam negara yang mayoritas beragama Islam otomatis banyak yang memilih laki-laki sebagai pemimpin. Dengan begitu beliau merasa tertantang dan beliau memulai safari politiknya mulai dari desa ke desa lalu kota ke kota yang ada di Pakistan untuk menunjukkan tekadnya bahwa Menegakkan keadilan dan menggulingkan pemerintahan Zia yang dianggapnya merupakan pemerintahan diktatorial<sup>22</sup>.

Partai *Pakistan People's Party* (PPP) yang dipimpin oleh Benazir Bhutto akhirnya membuahkan hasil tanggal 16 November 1988 partai tersebut memenangkan pemilu yaitu dengan memperoleh 92 kursi dari 207 kursi yang diperebutkan. Partai ini melawan 2 partai yang sama-sama kuat nya. Dari sini lah politik Benazir mulai diuji, yang mana beliau adalah orang pertama perempuan yang mendapatkan kedudukan sebagai perdana menteri di Pakistan. Meski begitu masih banyak yang kurang setuju dengan terpilihnya Benazir sebagai perdana menteri perempuan pertama ini, terutama pada golongan konservatif. Golongan ini yang mana di dalamnya termasuk golongan yang sangat Islami, para pemimpin agama yang memiliki sedikit apresiasi untuk tantangan-tantangan pembaharuan dan modernisasi bangsa<sup>23</sup>.

Walaupun didalam data partai dari Benazir PPP (*Pakistan People's Party*) menang dan mendapatkan suara paling banyak rintangan selanjutnya ialah Benazir harus bisa mendapatkan koalisi dari berbagai partai terkuat yaitu IJI (Islami Jamhoori Ittihad) dan MQM (Muhajir Qaumi Movement) karena partainya tidak memperoleh mayoritas mutlak 2/3 dari seluruh jumlah kursi parlemen atau setidaknya minimal 50%+1. Berbagai cara agar Benazir bisa membujuk IJI dan MQM untuk diajak kerjasama. Oleh karna itu

---

<sup>21</sup> Raul B. Rais, "PAKISTAN IN 1988: From Command to Conciliator Politics", ASIAN SURVEY, Vol XXIX, No. 2, February 1989, h. 207

<sup>22</sup> Dhuroruddin Mashad, *Benazir Bhutto: Profil Politisi Wanita di Dunia Islam*, h. 73.

<sup>23</sup> "Sekilas Perjalanan Politik bhutto". KOMPAS 27 Desember 2007. h. 4.

kelompok-kelompok sosial, ekonomi, dan para profesional menjadi ragu jika Benazir memimpin pemerintahan. Para birokrat sipil dan militer, pedagang dan industrialis besar serta kelas menengah mempunyai alasan untuk mengkhawatirkan kembalinya PPP (*Pakistan People's Party*). Alasannya yaitu ketika ayahnya Ali Bhutto memimpin ternyata ingkar dengan janjinya yang telah dijanjikan mengatasnamakan partai PPP (*Pakistan People's Party*)<sup>24</sup>.

Cara Benazir yang berbeda meluluhkan hati "Islamabadists" dan partai-partai besar kemudian setuju untuk bekerja sama tetapi sesuai dengan syarat yang ditulis oleh "Islamabadists", yaitu mengizinkan urusan militer ditangani oleh kelompok militer dan kebijakan perang saudara Zia terus berlanjut. perkembangan di negara tetangga Afghanistan. Agar kesepakatan dihormati, Benazir Bhutto juga menyetujui proposal "Islamabadist" agar partai mereka menjadikan Ishaq Khan sebagai presiden. Sepuluh hari kemudian, Benazir Bhutto menjadi perdana menteri setelah meyakinkan MQM untuk membentuk koalisi untuk membentuk pemerintahan bersama<sup>25</sup>.

Pada bulan Desember 1988 tepat di umur yang ke 35 tahun Benazir Bhutto perempuan pertama yang resmi menjadi perdana menteri di Pakistan yang negara tersebut mayoritas muslim pada abad modern. Atas kabar kemenangannya itu tim dari Benazir mengumumkan samapi ke pelosok desa sehingga warga Pakistan ikut merasakan senang karena mereka sudah capek dipimpin oleh rezim militer yang otoriter selama 11 tahun<sup>26</sup>.

Sejak awal pemerintahannya pada bulan Desember 1988, hal itu dirusak oleh fakta bahwa PPP hanya memiliki sedikit kursi di Majelis Nasional dan menguasai dua dari empat pemerintah provinsi, yaitu Sindh dan NWFP. Pemerintah Benazir Bhutto awalnya ingin meningkatkan pengeluaran untuk kesehatan dan pendidikan, tetapi ketegangan yang meningkat dengan India membuat pemotongan anggaran pertahanan dan keamanan yang tidak dapat dibenarkan saat menyajikan anggaran pertahanan 1990-1991<sup>27</sup>.

Pada nyatanya pihak militer masih ragu-ragu dalam menjalankan tugas dibawah pimpinan Benazir dan warga sipil,

---

<sup>24</sup> Samina Yusman, *"The Politics of Dismissal in Pakistan"*, Asian Studies Review, Vol 17. No. 1, July 1993 h. 84

<sup>25</sup> Dhurorudin Mashad, *"Pemilu di Pakistan 1990; Kegagalan Benazir Bhutto Dalam Meraih Kekuasaan"*, h. 78.

<sup>26</sup> Dhurorudin Mashad, *"Pemilu di Pakistan 1990; Kegagalan Benazir Bhutto Dalam Meraih Kekuasaan"*, h. 82.

<sup>27</sup> Charles H. Kennedy, *"Policies of Ethnic Preference in Pakistan"*, ASIAN SURVEY, vol. XII, NO. 6, September 1989, hal. 693.

namun jika hal tersebut diungkapkan dan membuat keributan maka Amerika akan memotong anggaran yang telah diberikan kepada militer Pakistan, untuk menghindari hal tersebut militer hanya diam dan mengikuti perintah dari Benazir. Sampai akhirnya Benazir memutuskan untuk memecat Letjen. Hamid Gul, seorang Kepala Dinas Intellegen yang merupakan salah satu arsitek kebijakan tentang Afghanistan. Tentu saja hal tersebut memancing kemarahan militer terhadap presiden Benazir Bhutto<sup>28</sup>.

Tentara semakin tidak puas dengan Benazir Bhutto karena mencampuri urusan internal militer dengan memperpanjang masa jabatan beberapa pensiunan perwira. Hubungan Benazir Bhutto dengan militer semakin memburuk ketika pemerintahnya tidak menangani masalah etnis yang muncul kembali setelah 9 Maret 1989, yaitu konflik antara etnis Muhajir, yang merupakan imigran India yang berbicara bahasa Urdu, dan Punjabi Pathan yang berasal dari utara. Karachi. Bahwa MQM harus memboikot harian. Daerah berbahasa Urdu yang sebelumnya menolak melaporkan kegiatan Muhajir<sup>29</sup>.

Akibat dari konflik tersebut sampai salah satu dari etnis tersebut mendesak pemerintah agar meluncurkan pemberitaan untuk tidak keluar rumah dahulu, semakin kelut konflik tersebut dikarenakan etnis Muhajirin menagih janji yang telah Benazir dan partai nya buat yaitu dengan memberikan lapangan pekerjaan kepada kaum Muhajirin, membebaskan tahanan MQM yang ditahan sejak pemerintahan Zia ul-Haq, dan janji Benazir untuk bersikap adil terhadap kaum kecil sewaktu dirinya dalam membentuk koalisi<sup>30</sup>.

## B. Deskripsi Data Penelitian

### 1. Periode Kepemimpinan Benazir Bhutto

#### a. Periode Pertama

Benazir Bhutto memimpin Pakistan selama 2 periode, Periode pertama pada tahun 1988-1990. Dalam periode pertama ini Benazir mendedikasikan keberhasilan menjadi perdana menteri kepada alm. ayahnya yang pada saat itu dieksekusi mati oleh Zia Ul-Haq. Kejadian ini dijadikan Benazir sebagai fundamental bagi titik balik (*turning point*)

---

<sup>28</sup> Muhammad Farouk, "Pengaruh Militer di Pakistan", artikel diakses pada 10 November dari, (<http://www.media-indonesia.com/subscribe/login.asp?mcid=>)

<sup>29</sup> Charles H. Kennedy, "Policies of Ethnic Preference in Pakistan", ASIAN SURVEY, vol. XII, NO. 6, September 1989, hal. 697.

<sup>30</sup> Dhuroruddin Mashad, *Benazir Bhutto: Profil Politisi Wanita di Dunia Islam*, h. 84.

kehidupannya untuk terjun secara langsung dalam dunia politik dan langsung menghapus semua kebijakan dari Zia Ul-Haq yang sangat merugikan bagi rakyat maupun negara<sup>31</sup>.

Pada periode pertama ini Benazir melakukan berbagai terobosan untuk beberapa hak yang seharusnya ada untuk rakyat Pakistan yang sudah dihapus dengan tidak sah oleh para pemerintah sebelumnya. Menghapus semua kebijakan dari pemerintah sebelumnya yang memang sangat-sangat merugikan bagi negara maupun bagi rakyat Pakistan itu sendiri<sup>32</sup>.

Kebijakan yang diubah oleh Benazir sangat banyak melihat bahwa pemerintah sebelumnya adalah mereka yang memimpin negara hanya menggunakan kata “negara Islam” namun kenyataannya mereka memimpin secara diktator. Maka dari itu setelah terpilihnya Benazir sebagai perdana menteri, Benazir langsung melakukan balas dendam terhadap penguasa yang selama ini mengatur negara dengan sewenang-wenang<sup>33</sup>.

#### **b. Periode Kedua**

Pada periode kedua ini (1993-1996), Benazir melakukan terobosan baru yaitu dengan melakukan tekad Orde Baru menuju abad 21. Terobosan tersebut tentu saja dilatar belakangi oleh partai yang ia pimpin yaitu PPP (*Pakistan People's Party*). Dengan menerapkan manifesto partai ini lah Benazir ingin membuat kebijakan baru yang bertujuan untuk memajukan negara Pakistan yang saat itu masyarakatnya sangat jauh dari kata layak<sup>34</sup>.

Pada perebutan mahkota perdana menteri Pakistan Benazir bersama Nawaz Sharif kembali bersaing, ini meruoakan persaingan yang ketiga kali nya sejak berakhirnya pemerintahan Zia Ul-Haq. Dalam kemenangan yang kedua ini Benazir hanya perlu memperbaiki kebijakan-kebijakan

---

<sup>31</sup> Siti Musdah dan Anik Farida, *Perempuan dan Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005, h. 56.

<sup>32</sup> As Sayyid Abdul Hamid Az Zahrawie, *Tokoh Wanita Sebelum dan Sesudah Islam*, Terj. Mursal Hm Taher, Ali Ahmad Zen, & Jalaluddin (Bandung: alma'arif, 1979), h. 93.

<sup>33</sup> Khoirul Imam, *Politik Benazir Bhutto (Analisis Terhadap Keberhasilan Menjadi Perdana Menteri Pakistan Tahun 1988 Dan 1993)*, Skripsi, h. 22.

<sup>34</sup> Khoirul Imam, *Politik Benazir Bhutto (Analisis Terhadap Keberhasilan Menjadi Perdana Menteri Pakistan Tahun 1988 Dan 1993)*, Skripsi, h. 24.

dari pemerintahan sebelumnya, yaitu dengan memperbaiki hubungan antar negara<sup>35</sup>.

## 2. Kebijakan Dalam Kepemimpinan Benazir Bhutto

Strategi modernisasi adalah salah satu kebijakan yang dilakukan Benazir, karena dilihat dari latar belakang Benazir yang menempuh pendidikan di luar negeri yang telah paham bagaimana pola pikir dari berbagai negara untuk bisa memajukan suatu negara. Pada dua periode inilah Benazir memiliki kesempatan untuk merubah semua pola pikir rakyatnya yang masih belum bisa berpikir kritis atau masih menggunakan pola pikir tradisional<sup>36</sup>.

### a. Bidang Pendidikan

Benazir sangat peduli dengan pendidikan, yang mana hal tersebut masih terlalu “ambigu” bagi perempuan karena pada saat itu perempuan di Pakistan sangat memprihatinkan yang buta dengan huruf dan tidak bisa membaca. Itulah yang membuat Benazir untuk tetap memperjuangkan pendidikan bagi perempuan bagaimana pun caranya<sup>37</sup>.

Islam membebaskan perempuan untuk bisa belajar dan mengejar cita-citanya. Melihat Pakistan adalah negara Islam yang sangat rendah dalam kesetaraan gendernya, ini membuat sekolah-sekolah yang ada di Pakistan dipenuhi oleh kaum laki-laki. Akibat dari kejadian itu membuat perempuan bisa menikah dini, ini sangat memprihatinkan perempuan yang seharusnya bisa bersekolah dan main harus mengurus rumah tangga sejak dini<sup>38</sup>.

Pada saat itu hal tersebut atau pernikahan dini sangat wajar bagi masyarakat Pakistan, banyak laki-laki cukup umur yang menikahi perempuan di bawah umur. Orang tua mereka pun setuju-setuju saja karena itu sudah seperti kebiasaan atau hal yang lumrah dilakukan. Padahal kenyataannya hal tersebut sudah diatur dalam UU No. 29 tahun 1929 yang kemudian diamandemen oleh Ordinansi No. 8 tahun 1961

---

<sup>35</sup> Benazir Bhutto dan Mark A Siegel, *Reconciliation Islam, Democracy, and The West. Dalam Rekonsiliasi Islam, Demokrasi dan Barat*, Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer, 2008, h. 67.

<sup>36</sup> Mashad Dhorroruddin, *Benazir Bhutto: Profil Politisi Wanita di Dunia Islam*, 1996, Jakarta: Cidesindo, h. 35.

<sup>37</sup> Mashad Dhorroruddin, *Benazir Bhutto: Profil Politisi Wanita di Dunia Islam*, 1996, Jakarta: Cidesindo, h. 40.

<sup>38</sup> Irnawati, “*Demokrasi di Pakistan Menurut Benazir Bhutto*”, *Al-Daulah Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, (2015), h. 155.

*Muslim Family Law Ordinance* (MFLO). MFLO mengatur bahwa jika ada yang melanggar batas minimum usia pernikahan maka akan dikenakan hukuman, yaitu penjara paling lama satu bulan atau denda setinggi-tingginya sebesar seribu rupee atau bisa juga dua-duanya. Bahkan jika ada orang tua atau wali yang mendukung pernikahan tersebut maka dikenakan hukuman juga<sup>39</sup>.

Kenyataannya dalam kehidupan masyarakat Pakistan pada saat itu masih banyak yang melanggar UU yang sudah dibuat. Hal itu terjadi karena beberapa masyarakat Pakistan beralasan agar bisa mempertahankan tradisi dari nenek moyang. Adat tersebut yang dimaksudkan seperti adat barter perkawinan, adat kawin paksa, adat penyerahan perempuan dan anak-anak sebagai akibat dari konflik antar suku, dan lain-lain<sup>40</sup>.

Benazir juga menghapus larangan berserikat bagi mahasiswa dan buruh. Mendengar hal tersebut sontak membuat para mahasiswa sorak bergembira. Selain itu para organisasi mahasiswa pun dihidupkan kembali, karena pada masa pemerintahan Zia ul-Haq organisasi mahasiswa dilarang dan para mahasiswa yang sempat dipecat karena mencoba melawan kebijakan dari Zia ul-Haq diijinkan belajar kembali oleh Benazir. Dan juga penjagaan ketat bersenjata yang dilakukan oleh polisi di dalam kampus pun dihapuskan, serta mengembalikan buku-buku mereka yang sempat dirampas oleh para diktator<sup>41</sup>.

Terbukti bahwa terhapusnya larangan mahasiswa yang harus berserikat dengan banyaknya atlet wanita yang sudah berhasil mengembangkan dirinya dengan setor beberapa medali untuk negara. Contohnya adalah Kulsoom Abdullah atlet angkat besi kelahiran tahun 1976 yang menjadi wanita pertama untuk mewakili negara Pakistan pada kejuaraan dunia tahun 2011 untuk olahraga angkat besi<sup>42</sup>.

---

<sup>39</sup> Ni'matul Husna, "*Hak Politik Perempuan Islam Menurut Benazir Bhutto*", Tesis, UIN Sunan Kalijaga, (2010), h. 23.

<sup>40</sup> Ni'matul Husna, "*Hak Politik Perempuan Islam Menurut Benazir Bhutto*", Tesis, UIN Sunan Kalijaga, (2010), h. 25.

<sup>41</sup> Irnawati, "*Demokrasi di Pakistan Menurut Benazir Bhutto, Al-Daulah Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*", (2015), h. 157.

<sup>42</sup> Ani Nursalikah, "*8 Atlet Muslimah yang berani dobrak stereotip perempuan Muslim*" (<https://www.google.com/amp/s/m.republika.co.id/amp/o2b7cd366>), data diakses pada 23 November 2022.

Dalam merealisasikan kebijakan yang ia buat, Benazir melimpahkan semua dana yang seharusnya disalurkan ke dalam dana militer diubahnya menjadi dana pendidikan. Menurutnya dana untuk militer pada saat itu terlalu banyak sedangkan dana untuk pendidikan sangat sedikit. Jika dilihat pendidikan juga penting untuk rakyat Pakistan agar kedepannya masyarakatnya bisa memajukan atau mengembangkan negaranya lebih maju lagi<sup>43</sup>.

#### b. Bidang Sosial Politik

Selain kebijakan dalam ranah pendidikan, Benazir juga giat memperbaiki sistem kinerja dalam ranah sosial dan politik. Dalam politik itu sendiri Benazir giat merekrut banyak wanita untuk ikut bergabung dalam partainya yang bertujuan untuk menolong para wanita agar tidak berada dalam rumah terus. Dukungan terus diberikan Benazir untuk para perempuan agar bisa ikut campur dalam dunia politik<sup>44</sup>.

Dalam kepemimpinannya, Benazir sangat memperhatikan kesenjangan sosial yang ada di negaranya. Sosial politik adalah suatu hubungan yang selalu mengikat erat kepada masyarakat. Sedangkan setengah rakyat dari Pakistan adalah bergender perempuan. Benazir yang selalu dengar kecaman dari berbagai negara yang mana Pakistan adalah negara Islam yang tidak memperbolehkan perempuan untuk masuk ke dalam ranah politik sangat geram dengan pernyataan tersebut<sup>45</sup>.

Menurut Benazir, Perempuan juga bisa menjadi subyek politik, tidak selalu obyek politik saja. Jika masih ada orang yang berpendapat bahwa perempuan tidak bisa keluar dari masyarakat dan memiliki suara dalam pengambilan keputusan, maka ada yang salah dengan penafsiran Islam<sup>46</sup>.

Benazir memberikan banyak dukungan dan motivasi untuk perempuan-perempuan Pakistan agar masuk dalam politik, namun di sisi lain ada beberapa masyarakat dan partai

---

<sup>43</sup> Benazir Bhutto, *Rekonsiliasi: Islam, Demokrasi, Dan Barat*, Terj. Annisa Rahmalia, Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer, (2008), h. 56.

<sup>44</sup> Benazir Bhutto, *Rekonsiliasi: Islam, Demokrasi, Dan Barat*, Terj. Annisa Rahmalia, Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer, (2008), h. 58.

<sup>45</sup> Hanggongonso Soetomo S., *Perjuangan Wanita Sejagat Menuntut Hak Politik*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990, h. 47.

<sup>46</sup> Benazir Bhutto, "Politik Dan Perempuan Muslim", Dalam: Wacana Islam Liberal: Pemikiran Islam Kontemporer Tentang Isu-Isu Global, (2003), Charles Kurzman, Ed. Jakarta: Paramadina, h. 88.

oposisi yang kurang setuju dengan kebijakan tersebut. Padahal tujuan dari kebijakan Benazir tersebut adalah untuk meningkatkan adanya partisipasi perempuan dalam politik<sup>47</sup>.

Selain itu juga Benazir juga melakukan portofolia keuangan yang mana Benazir berusaha untuk mencegah munculnya konfrontasi pusat ke daerah. Selanjutnya Benazir juga membebaskan bagi siapa pun untuk bersuara atau kebebasan pers yang tujuannya untuk memperkuat kehidupan demokrasi. Namun dalam merealisasikan kebijakannya tersebut banyak tantangan di mana situasi politik pakistan belum sepenuhnya mereda<sup>48</sup>.

Kebijakan luar negeri juga ia melanjutkan visi misi dari pemerintah sebelumnya yaitu dengan memperbaiki hubungan antar negara Soviet dan mengurangi ketegangan dengan India, yang mana pada saat itu hubungan Pakistan dengan India sedang tidak baik-baik saja. Maka dari itu Benazir memiliki keinginan untuk mengakhiri perseteruan dengan India dan berdamai<sup>49</sup>.

Satu prestasi besar yang dicapai oleh Benazir adalah keberhasilan Benazir dalam mengundang perdana menteri India, Rajiv Gandhi, untuk mengunjungi Pakistan dan membicarakan mengenai beberapa hal yang menjadi sandungan beberapa hal dalam hubungan luar negeri kedua negara tersebut. Dalam pertemuan tersebut keduanya menyepakati untuk mengadakan perundingan guna menyelesaikan masalah sesuai dengan semangat perjanjian Simla<sup>50</sup>.

### c. Bidang Ekonomi

Dalam pembuatan kabinet Benazir menunjuk beberapa perempuan untuk ikut dalam politik selain itu dalam aspek ekonomi juga Benazir melanjutkan kebijakan yang dulu nya waktu Ali Bhutto memimpin membuat kebijakan dengan membuka lowongan pekerjaan bagi masyarakat yang lulusan ekonomi bisnis dan manajemen, dengan ini bertujuan agar

---

<sup>47</sup> Ahmad Aziz, *Islamic Modernism in India and Pakistan*, London: Oxford Univ Press, 1967, h. 37.

<sup>48</sup> Siti Musdah dan Anik Farida, *Perempuan dan Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005. h. 70.

<sup>49</sup> M. Atho Mudzar, "*Hukum Keluarga di Pakistan (Antara Islami dan Tekanan adat)*", 2014, h. 89.

<sup>50</sup> Anita M Weis & Khotimatul Husna (Eds), *Kontroversi Hakim Perempuan Pada Peradilan Islam Di Negara-Negara Muslim*, 2011, Yogyakarta: Lkis, h. 78.

ilmu yang didapat bisa dipraktikkan secara langsung. Di era Benazir ini bisa dibilang berhasil karena banyaknya lowongan pekerjaan yang membutuhkan jasa perempuan atau lowongan pekerjaan terbuka luas untuk perempuan<sup>51</sup>.

Benazir juga membuat kementerian perkembangan wanita, dan bank pembangunan wanita. Bank tersebut ditujukan untuk perempuan agar bisa berwirausaha sendiri dengan meminjamkan modal kepada wanita-wanita Pakistan yang ingin membuka usaha dan mengembangkan diri<sup>52</sup>.

Inilah bukti nyata selama kepemimpinannya dalam isu kesetaraan gender yang mana Benazir selalu meningkatkan partisipasi perempuan dalam segala aspek. Hasil dari perjuangannya selama 2 periode adalah banyak perempuan yang menjadi polisi, menjadi pengacara hebat, dan mau masuk dalam ranah dunia politik<sup>53</sup>.

#### d. Kesetaraan Gender

Kebijakan Benazir dalam kesetaraan gender ini sangat diprioritaskan, dilihat dari berbagai kebijakan yang dibuat oleh Benazir, ia selalu membukakan pintu atau memberikan kesempatan bagi perempuan untuk bisa mendapatkan hak-hak mereka sebagaimana laki-laki mendapatkan haknya. Dengan selalu mengikutsertakan perempuan dalam segala bentuk kegiatan apapun itu<sup>54</sup>.

Memberikan kesempatan untuk perempuan agar tidak buta huruf lagi, memberikan kesempatan perempuan untuk bisa menjadi wanita karir, mengejar cita-citanya. Benazir juga memberikan pengertian tentang perempuan bisa sejajar dengan laki-laki dalam aspek apapun itu, walaupun terlihat agoran namun dengan demikian hak perempuan bisa diberikan<sup>55</sup>.

---

<sup>51</sup> Siti Musdah dan Anik Farida, *Perempuan dan Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005, h. 59.

<sup>52</sup> Anita M Weiss, "Benazir Bhutto and The Future of Women in Pakistan", *Asian Survey*. Vol. xxx, No 5, May 1990, h 435.

<sup>53</sup> M. Atho Mudzar, "Hukum Keluarga di Pakistan (Antara Islami dan Tekanan adat)", 2014, h. 70.

<sup>54</sup> Ni'matul Husna, "Hak Politik Perempuan Islam Menurut Benazir Bhutto", Tesis, UIN Sunan Kalijaga, (2010), h. 26.

<sup>55</sup> Husein Muhammad, "Gagasan Tafsir Feminis", *Jurnal Islam Indonesia*, (Vol. 6, No. 02, Februari 2017), h. 5.

## C. Analisis Data Penelitian

### 1. Kepemimpinan Benazir Bhutto Sebagai Perdana Menteri Perempuan Pertama di Pakistan

Pemikiran Amina meliputi pemikiran liberal, eksistensial, dan feminis radikal. Amina memperjuangkan kesetaraan dan ketidakadilan bagi perempuan dalam hukum keluarga. Hal ini terlihat sebagai pengaruh dari arus feminisme liberal. Menurut Amina, interpretasi atomistik klasik telah menghasilkan interpretasi yang membatasi peran perempuan bahkan membenarkan kekerasan terhadap perempuan. Selain itu, hampir semua komentator klasik adalah laki-laki. Jadi hanya minat dan pengalaman laki-laki yang mempengaruhi hasil interpretasi mereka. Dalam kaitan ini, makna tafsir al-Qur'an feminis mengacu pada gagasan kesetaraan dan keadilan antar jenis kelamin dan menolak sistem patriarki<sup>56</sup>.

Dalam beberapa pengertian atau penjelasan yang diambil dari pemikiran Amina kita bisa lihat bahwa ternyata dalam Al-qur'an telah menjelaskan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kesetaraan. Demikian juga perempuan dalam kepemimpinan dan politik memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki dalam memimpin jabatan politik dan memimpin organisasi bahkan negara, dalam kepemimpinan setiap individu mendapat kemampuan yang berbeda-beda yang ditentukan oleh kehendak Tuhan. Jadi laki-laki dan perempuan pada orang-orang tertentu memiliki kualitas kepemimpinan yang baik<sup>57</sup>.

Feminisme Liberal adalah gerakan yang tercermin dalam setiap perjuangan yang dilakukan oleh perempuan untuk menuntut hak kebebasan mereka<sup>58</sup>. Pemikiran feminisme liberal ini juga diterapkan oleh Benazir yang mana seperti yang dilakukan oleh Benazir membebaskan bagi siapa pun untuk bersuara atau kebebasan pers yang tujuannya untuk memperkuat kehidupan demokrasi. Selain itu Benazir juga memberikan kebebasan bagi perempuan Pakistan untuk memberikan peluang diberbagai bidang seperti politik, sosial, dan masih banyak lagi<sup>59</sup>.

---

<sup>56</sup> Amina Wadud, *Qur'an menurut Perempuan: Membaca Kembali Kitab Suci dengan Semangat Keadilan* (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2006), h.179.

<sup>57</sup> Amina Wadud, *Inside The Gender Jihad: Women Reform's In Islam*, (England: Oneword Publications, 2006), h. 92.

<sup>58</sup> Titiek Kartika, *Perempuan Lokal vs Tambang Pasir Besi Global*, (Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), 57.

<sup>59</sup> Siti Musdah dan Anik Farida, *Perempuan dan Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005. h. 70.

Feminisme radikal adalah aliran pemikiran bahwa penindasan terhadap perempuan disebabkan oleh sistem budaya patriarki. Feminis radikal tidak melihat perbedaan antara tujuan pribadi dan politik, elemen seksual atau biologis<sup>60</sup>. Kedudukan antara laki-laki dan perempuan inilah yang Allah jadikan lebih dari masing-masing individu. Tidak semua pria lebih baik dari wanita dalam segala hal. Dalam satu kasus, pria bisa tampil lebih baik dari wanita, tapi di kasus lain, wanita bisa tampil lebih baik dari pria<sup>61</sup>.

Seperti Benazir Bhutto perdana menteri Pakistan yang sudah membuktikan bahwa perempuan juga bisa menjadi pemimpin seperti laki-laki walaupun memang dalam aspek gender masih banyak yang pro dan kontra. Dalam kepemimpinannya ini Benazir sangat menjunjung tinggi peran perempuan untuk negaranya. Banyak contoh yang kita bisa lihat seperti banyaknya perempuan yang ditawarkan untuk ikut politik Pakistan, yang mana Benazir ingin mengajarkan perempuan Pakistan untuk ikut berpartisipasi untuk ketatanegaraannya. Dengan berbagai cara Benazir melakukan hal tersebut meski banyak masyarakat yang kurang setuju dengan pemikiran Benazir yang selalu menonjolkan perempuan<sup>62</sup>.

Dengan memperjuangkan hak-hak perempuan yang mana pada saat itu situasi negara dan politik Pakistan sangat terpuruk. Hak perempuan yang tidak diperkenankan untuk sekolah, keluar rumah, bahkan bermain dengan teman sebayanya pun sangat susah didapatkan oleh perempuan-perempuan Pakistan saat itu. Itulah yang membuat miris Benazir yang mana hak tersebut seharusnya bisa didapatkan dengan mudah namun dengan kebalikannya perempuan di sana sangat kesusahan untuk mendapatkan hak serta susah untuk mengeluarkan argumen mereka<sup>63</sup>.

Simone de Beauvoir menghadirkan gerakan feminis eksistensial untuk mencapai tujuannya dengan gagasan transendensi, yaitu gagasan transendensi. Menurutnya, ada empat strategi transendensi yang bisa diterapkan:

---

<sup>60</sup> Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), 2008, h. 10.

<sup>61</sup> Amina Wadud, *Inside The Gender Jihad: Women Reform's In Islam*, (England: Oneword Publications, 2006), h. 91

<sup>62</sup> Zaenal Ali, *Tragedi Benazir Bhutto* (Yogyakarta: Narasi, 2008).

<sup>63</sup> Dhuroruddin, *Benazir Bhutto: Profil Politisi Wanita di Dunia Islam*.

(1) perempuan dapat bekerja, meskipun sulit dan melelahkan; (2) perempuan bisa menjadi intelektual; (3) perempuan dapat bekerja untuk mencapai transformasi sosialis masyarakat; dan (4) perempuan dapat menolak perbedaan mereka dengan mengidentifikasi diri mereka dengan pandangan kelompok dominan dalam masyarakatmasyarakat<sup>64</sup>.

Dalam kinerja Benazir sebagai perdana menteri, ia melakukan beberapa kebijakan yang dapat dilihat bahwa kebijakan tersebut termasuk dalam feminisme eksistensial, sebagai contoh yaitu dengan membukakan lowongan pekerjaan seluas-luasnya untuk perempuan, memberikan peluang juga untuk perempuan bisa mengembangkan pola pikirnya untuk lingkungan sekitar maupun negara<sup>65</sup>.

Kesetaraan gender pada saat itu sangat minim, dilihat bahwa Pakistan adalah negara Islam, untuk toleransi kesetaraan gender sangat kurang bahkan tokoh agama pun banyak yang mengabaikan hal tersebut. Pada saat Benazir mencoba untuk maju menjadi perdana menteri Pakistan beberapa tokoh agama dan masyarakat yang kurang setuju dengan pemimpin yang dipegang oleh perempuan, padahal dalam Islam telah mengajarkan tentang menghargai kesetaraan gender pemimpin perempuan<sup>66</sup>.

Amina berkata bahwa laki-laki dan perempuan hanyalah kategori dari spesies manusia. Keduanya memiliki potensi yang sama atau sama dalam hal penciptaan dan berpasangan dengan pahala yang akan diterimanya di akhirat nanti. Satu-satunya nilai yang membedakan adalah ketaqwaan, artinya yang membedakan individu adalah ketaqwaan mereka terhadap Allah SWT<sup>67</sup>.

Perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki, namun sebagai perempuan tentu memiliki karakter dan keterbatasan yang berbeda dengan laki-laki. Dari cerita di atas dapat kita analisa bahwa sudah menjadi kodrat seorang wanita untuk hamil dan mengasuh anak. Dalam hal kesetaraan gender, seorang

---

<sup>64</sup> Risma Khairun Nisya dan Andina Dwi Komalasari, *Eksistensi Perempuan Dalam Novel Sempurna Karya Novanka Raja: Kajian Feminisme Eksistensialis*, (Bahtera Indonesia, Vol. 5, No. 2, 2020), h. 168.

<sup>65</sup> Siti Musdah dan Anik Farida, *Perempuan dan Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005, h. 59.

<sup>66</sup> Amina Wadud, *Inside The Gender Jihad: Women Reform's In Islam*, (England: Oneword Publications, 2006), h. 26.

<sup>67</sup> Amina Wadud, *Inside The Gender Jihad: Women Reform's In Islam*, (England: Oneword Publications, 2006), h. 28.

wanita diberikan kebebasan untuk bekerja atau disebut sebagai wanita karir. Perempuan memiliki hak yang sama untuk bekerja seperti laki-laki. Namun kembali Al-Qur'an menegaskan bahwa fitrah wanita sebagai ibu adalah salah satunya<sup>68</sup>.

## 2. Kepemimpinan Benazir Bhutto Dalam Perspektif Amina Wadud

Amina Wadud adalah salah satu pemikir kontemporer yang mentransformasikan pemikiran metodis tentang tafsir al-Qur'an untuk menghasilkan tafsir yang berbasis gender dan keadilan. Di sini Amina Wadud justru mengimplementasikan interpretasi isu gender untuk memperjuangkan hak-hak perempuan berdasarkan interpretasinya. Menurutnya, Al-Qur'an satu-satunya landasan tertinggi bagi persamaan status yang adil dan adil antara laki-laki dan perempuan. Padahal, semua perintah dan peraturan hukum Al-Qur'an ditafsirkan dalam konteks sosio-historis tertentu<sup>69</sup>.

Menurut Wadud, Al-Qur'an menunjukkan bahwa kodrat laki-laki dan perempuan saling melengkapi dan keduanya memiliki hak dan kewajiban pada tingkat kegiatan etika, agama dan sosial. Baik perempuan maupun laki-laki sama-sama memiliki hegemoni dalam kepemimpinan, misalnya dalam ibadah dimana perempuan maupun laki-laki dapat mengikuti salat Jumat sebagai umat dan imam. Aspek kepemimpinan wanita dalam ibadah ini memberikan dukungan bagi kepemimpinan wanita dalam hal-hal lain<sup>70</sup>.

Ayat yang dijadikan dalil tentang kepemimpinan laki-laki atas perempuan adalah surat al-Nisa', ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ  
وَمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Artinya: kaum laki-laki itu sebagai pemimpin bagi kaum perempuan. Allah telah mengutamakan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka).

<sup>68</sup> Hasbi Indra, dkk, *Potret Wanita Sholehah*, (Jakarta: Penamadani, 2004), h. 4.

<sup>69</sup> Ernita Dewi, "Pemikiran Amina Wadud Tentang Rekonstruksi Penafsiran Berbasis Metode Hermeneutika", *Jurnal Substantia*, (Vol. 15, No. 2, 2013), h. 2-3.

<sup>70</sup> Arsal dkk, "Kepemimpinan Perempuan: Penerapan Metode Tafsir Hermeneutika Feminisme Amina Wadud", (Vol. 4, No. 2, 2020), h. 13.

Wadud membahas konsep yang berkaitan dengan konsep *Qawwāmūna*, yaitu konsep *Nusyūz* dan *Qānitāt*. Ia menolak konsep *Qawwāmah* (kepemimpinan) dan tafsir *Nusyūz* dan *Qānitāt* yang didasarkan pada nilai-nilai superioritas laki-laki atas perempuan, mengingat tugasnya memberikan dukungan materi dan melindungi perempuan. Wadud berpendapat bahwa jika syarat-syarat di atas tidak terpenuhi atau jika laki-laki tidak menunaikan tanggung jawabnya untuk memenuhi kebutuhan perempuan, maka laki-laki tidak dapat disebut sebagai pemimpin perempuan (*qawwāmūn*).

Selain mengartikan kata *Qawwāmah*, Wadud di atas juga menonjolkan kata *wadhribuhunna* dalam surat al-Nisa ayat 34 yang menurutnya kata ini tidak boleh diabaikan karena mendukung keunggulan laki-laki atas perempuan dalam urusan kepemimpinan.<sup>71</sup> Kata Alquran ini memiliki banyak arti tetapi arti yang paling umum digunakan adalah memukul wanita. Menurut Wadud, ayat ini merujuk pada kekerasan terhadap perempuan pada saat ayat ini diturunkan, seperti cara orang membunuh bayi perempuan.<sup>72</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa ayat terkemuka dimaknai berdasarkan nilai-nilai keunggulan laki-laki atas perempuan. Al Quran tidak melarang perempuan menjadi pemimpin. Pemahaman konsep ayat di atas telah memunculkan anggapan bahwa perempuan lebih rendah dari laki-laki, perempuan harus patuh pada suaminya, dan laki-laki boleh memukul istrinya. Pemahaman seperti itu menjadi umum, sehingga perempuan dilarang menjadi pemimpin. Kesimpulan Wadud adalah tidak ada satu ayat pun yang melarang perempuan menjadi pemimpin. Manajemen bersifat fungsional, bukan materialfisikal<sup>73</sup>.

Kenyataan dalam Islam membuktikan mengapa kedudukan wanita terbelakang dari pada pria. Amina mau membangkitkan kedudukan wanita dalam kesetaraan dengan menggunakan kedekatan gender, dengan berprinsip pada keadilan sosial serta kesetaraan gender. Amina pula mau menyelamatkan wanita dari konservatisme Islam. Maka dari itu, model pemikiran ktitis atas

---

<sup>71</sup> Ariana Suryorini, "Menelaah Feminisme Dalam Islam", *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, (vol. 7, no. 2, 2012), h. 29.

<sup>72</sup> Ariana Suryorini, "Menelaah Feminisme Dalam Islam", *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, (vol. 7, no. 2, 2012), h. 36.

<sup>73</sup> Husein Muhammad, "Gagasan Tafsir Feminis", *Jurnal Islam Indonesia*, (Vol. 6, No. 02, Februari 2017), 3.

uraian bacaan Al-quran merupakan jadi pemecahan supaya ketimpangan yang berbasis gender tidak terus menjadi meresahkan, akibat dari otoritas serta legitimasi pesan Agama<sup>74</sup>.

Amina berpendapat tentang di mana Islam merupakan agama feminis serta bagaimana berupaya buat menafsirkan serta membaca kembali Al-quran dalam pandangan feminisme. Baginya banyak hal yang menimbulkan pengertian cukup fatal tentang wanita; budaya masyarakat, kesalahan diparadigma nya, serta *background* para penafsir yang mayoritas dari laki-laki. Oleh sebab itu ayat tentang wanita hendaklah ditafsirkan oleh wanita sendiri bersumber pada persepsi, pengalaman serta pemikiran mereka<sup>75</sup>.

Kegelisahan yang dialami Amina merupakan fenomena patriarki dalam warga muslim. Dia memandang tentang marginalisasi kedudukan perempuan dalam tatanan sosial yang sepanjang ini terus terjadi hingga kini. Al-quran yang baginya bawa nilai keadilan, belum sanggup terasimilasi ke dalam kehidupan warga Islam. Hingga dia tidak ragu mempertanyakan gimana sesungguhnya wanita di perlakukan didalam Islam<sup>76</sup>.

Pemikiran gender serta feminisme Amina pada hakikatnya ialah suatu afirmasi kalau wanita merupakan manusia utuh. Maka dari itu, Amina menolak wacana patriarki yang tampak secara agresif terhadap wanita. Bagi Amina, ketimpangan gender dalam warga Islam merupakan sebab pengertian Al-quran didominasi oleh budaya patriarki, ialah kultur yang mentolerir terdapatnya penindasan terhadap wanita. Patriarki merupakan alat yang digunakan pria untuk menunjang hegemoninya dalam dominasi serta superioritas. Oleh sebab itu, Amina menggagas ide tentang Islam tanpa patriarki serta baginya, ide tersebut dapat berkembang dari imajinasi, hingga Amina mengimajinasikan akhir dari patriarki<sup>77</sup>.

Dalam hal ini dapat dibuktikan bahwa perempuan juga bisa menjadi pemimpin, salah satu contohnya yaitu Benazir Bhutto perdana menteri perempuan pertama di Pakistan. Benazir mampu

---

<sup>74</sup> Amina Wadud, *Inside The Gender Jihad: Women Reform's In Islam*, (England: Oneword Publications, 2006), h. 20.

<sup>75</sup> Amina Wadud, *Inside The Gender Jihad: Women Reform's In Islam*, (England: Oneword Publications, 2006), h. 20.

<sup>76</sup> Amina Wadud, *Inside The Gender Jihad: Women Reform's In Islam*, (England: Oneword Publications, 2006), h. 21.

<sup>77</sup> Amina Wadud, *Inside The Gender Jihad: Women Reform's In Islam*, (England: Oneword Publications, 2006), h. 91-92.

menunjukkan kepada dunia bahwa perempuan bisa menjadi seorang pemimpin, serta mampu mendobrak kebuntuan budaya patriarki yang ada di Pakistan dan menunjukkan bahwa wanita mampu melampaui batas bidang dosmetikanya. Benazir sangat ingin perempuan-perempuan yang ada di Pakistan bisa berkembang dalam pola pikirnya, maka dari itu Benazir berusaha meningkatkan intelektualitas perempuan Pakistan<sup>78</sup>.

Kasus ketidaksetaraan laki-laki serta wanita, bagi Amina, merupakan dari pencipta manusia seperti tercantum didalam Al-qur'an. Amina mau menarik benang merah bahwa pencipta manusia yang terpusat pada pentingnya "berpasangan" dalam penciptaan segala sesuatu. Oleh karena itu baik laki-laki ataupun perempuan sangat memiliki makna dalam penciptaan serta bersama mempunyai keunggulan. Amina menepis mitos kalau Hawa merupakan pemicu terlemparnya manusia dari surga. Amina berkomentar kalau peringatan Allah supaya menghindari bujukan setan itu diperuntukan kepada mereka berdua, ialah Adam serta Hawa<sup>79</sup>.

Al-qur'an berusaha menghilangkan perbedaan antara pria dan wanita, atau pentingnya perbedaan gender, yang akan membantu masyarakat memenuhi kebutuhannya dan berjalan dalam garis lurus. Namun Al-qur'an tidak menjelaskan seperangkat posisi atau definisi peran untuk setiap gender dalam setiap budaya<sup>80</sup>.

Al-qur'an tidak menjelaskan fungsi eksklusif laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan memiliki potensi yang sama untuk berpartisipasi secara konkrit dalam pemenuhan tanggung jawabnya. Amina menyangkal bahwa Tuhan memilih laki-laki sebagai Nabi dan Rasul karena jenis kelamin mereka. Tuhan memilih manusia sebagai utusan hanya karena faktor efisiensi. Amina menyarankan bahwa untuk mempercayai isi kitab ini, seseorang harus memahami pandangan dunia Al-qur'an dan menerima pandangan hidup, visi dan tujuan yang sebenarnya. Namun dalam konteks dunia yang berteknologi maju, komitmen tersebut membutuhkan perspektif global yang

---

<sup>78</sup> Ni'matul Husna, "*Hak Politik Perempuan Islam Menurut Benazir Bhutto*", (Tesis, UIN Sunan Kalijaga, 2010).

<sup>79</sup> Amina Wadud, *Inside The Gender Jihad: Women Reform's In Islam*, (England: Oneword Publications, 2006), h. 7-8.

<sup>80</sup> Amina Wadud, *Inside The Gender Jihad: Women Reform's In Islam*, (England: Oneword Publications, 2006), h. 8-9.

lebih luas, bukan hanya konteks lokal<sup>81</sup>.

Menurut Amina, tradisi masyarakat Islam yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan publik (agama, politik, dan sosial) mendistorsi makna keislaman perempuan. Amina percaya bahwa agama tidak membuat perempuan berbeda, melainkan interpretasi dan implementasi Alquran, sebuah struktur patriarki yang membatasi kebebasan perempuan dalam segala hal<sup>82</sup>.

Benazir dalam melaksanakan tugas sebagai perdana menteri juga mengalami kesulitan untuk bersosialisasi dengan masyarakat yang selalu memandang pemimpin seharusnya dan harus laki-laki. Namun dengan demikian tidak lantas Benazir menyerah untuk mundur sebagai perdana menteri, Benazir berusaha dengan keras dan membuktikan kepada masyarakat kalau perempuan juga bisa seperti laki-laki yang mana mampu menjadi pemimpin<sup>83</sup>.

Amina berkeyakinan bahwa dengan menggunakan metode tafsir tauhid, hal ini memungkinkan berkembangnya kerangka pemikiran bersistem untuk mengkorelasikan dan menunjukkan dampak kedekatan tanpa keluar dari konteks dan menjelaskan dinamika antara hal-hal universal tanpa mengeluarkannya dari konteks. Al-quran itu sendiri. Dalam membahas kesetaraan laki-laki dan perempuan, Amina menggiringnya pada akar persoalan teologis, asal mula penciptaan manusia dalam Q.S. al-Nisa, [4]: 1 dan Q.S. al-Rum [30]: 21<sup>84</sup>.

Masalah “kepemimpinan wanita” khususnya dalam setiap konteks telah menjadi perdebatan di dalam ranah publik. Secara epistemologis-teologis, kepemimpinan perempuan diperselisihkan di kalangan mufasir. Sebagaimana terhadap penafsiran surah an-nisa ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا  
 أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِينَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ

<sup>81</sup> Amina Wadud, *Inside The Gender Jihad: Women Reform's In Islam*, (England: Oneword Publications, 2006), h. 106-107.

<sup>82</sup> Amina Wadud, *Penggalan Khotbah Jum'at*, dalam Majalah Gatra edisi 2 April 2005, h. 81.

<sup>83</sup> Ni'matul Husna, “*Hak Politik Perempuan Islam Menurut Benazir Bhutto*”, (Tesis, UIN Sunan Kalijaga, 2010).

<sup>84</sup> Amina Wadud, *Qur'an menurut Perempuan: Meluruskan Bias Gender dalam Tradisi Tafsir* (Jakarta: Serambi, 2001), 14-15.

اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُمْ فَعِظُوهُمْ وَأَهْرِجُوهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ  
وَأَصْرِبُوهُمْ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِمْ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا

كَبِيرًا ﴿٤٦﴾

Artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (lakilaki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka, sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar<sup>85</sup>.

Mengenai ayat di atas, Amina menerima kepemimpinan laki-laki, namun laki-laki harus bisa menunjukkan kekuatannya dan menggunakan kelebihan itu untuk mendukung perempuan. Menurut Amina Wadud, kelebihan laki-laki hanyalah kelebihan dari hak waris yang ditentukan Alquran. Misalnya, laki-laki wajib menggunakan hartanya untuk menghidupi perempuan agar mendapat jaminan warisan ganda. Di sini tampak bahwa Amina Wadud lebih menekankan kata *fadhhdhala* ketika mengartikan surat an-Nisa ayat 34. Dalam mengartikan surat an-Nisa ayat 34, Amina Wadud lebih menekankan kata *fadhhdhala*<sup>86</sup>.

Menurutnya, ayat ini tidak berarti setiap orang secara otomatis memiliki keunggulan, karena ini hanya bersifat fungsional, yakni. selama orang tersebut memenuhi kriteria Al-Qur'an untuk mendapatkan utilitas dan rezeki. Ayat tersebut tidak menyebutkan bahwa semua laki-laki lebih tinggi dari

<sup>85</sup> Amina Wadud, *Qur'an menurut Perempuan: Meluruskan Bias Gender dalam Tradisi Tafsir* (Jakarta: Serambi, 2001), 141.

<sup>86</sup> Amina Wadud, *Qur'an menurut Perempuan: Meluruskan Bias Gender dalam Tradisi Tafsir* (Jakarta: Serambi, 2001), 147.

perempuan<sup>87</sup>.

Karya-karya dari Amina Wadud, antara lain seperti dalam bentuk buku: *Qur'an and Woman: Rereading The Sacred Text Form a Woman's Perspective*, (Oxford University Press, 1990), *Inside the Gender Jihad: Women's Refrom in Islam*, (England: Oneworld Publications, 2006). Selain buku ada juga karya Amina Wadud dalam bentuk artitel, seperti: a) *Alternatif Penafsiran Terhadap al-Qur'an dan Strategi Kekuasaan Wanita Muslim*, dalam buku *Tirai Kekuasaan: Aktivitas Keilmuan Wanita Muslim*. Editorial Gisela Webb, syracuse University Press, 1999. b) *Gender, Budaya dan Agama: Sebuah Perspektif Islam*, dalam buku *Gender, Budaya dan Agama: Kesederajatan di Hadapan Tuhan dan Ketidaksederajatan di Hadapan Laki-laki'*, editorial Norani Othman dan Cecilia Ng, Persatuan Sains Sosial, Kuala Lumpur Malaysia, 1995. c) *Mencari Suara Wanita dalam al-Qur'an*, dalam bab *Orbis Book*, SCM Press, 1998. d) *Muslim Amerika; Etnis Bangsa dan Kemajuan Islam*, dalam buku *Kemajuan Islam; Keadilan, Gender dan pluralisme'* Editorial Omid Safi, Oxfordd: One World publication, 2002. e) *Parameter Pengertian al-Qur'an terhadap Peran Perempuan dalam Konteks Dunia Modern*, dalam jurnal *Islamic Quarterly'*. Edisi Juli, 1992.

Karya-karya Amina Wadudi bersaksi tentang ketakutan intelektualnya terhadap ketidakadilan masyarakat. Maka ia mencoba melakukan rekonstruksi tafsir al-Qur'an secara metodis untuk menghasilkan penafsiran yang peka gender dan berkeadilan.

---

<sup>87</sup> Amina Wadud, *Qur'an menurut Perempuan: Meluruskan Bias Gender dalam Tradisi Tafsir* (Jakarta: Serambi, 2001), 148.